

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran	12 Terciptanya kebersihan dan keamanan kantor	12 60.000.000	Inspektorat Daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan mebeleur 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8 Pembangunan gedung kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah mobil dinas operasional kantor 2 Terwujudnya perlengkapan gedung kantor 3 Terwujudnya peralatan gedung kantor 4 Terwujudnya mebeleur 5 Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair 6 Jumlah perlengkapan gedung kantor 7 Jumlah peralatan kantor 8 Tersedianya gedung kantor dan perlengkapannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 300.000.000 2 27.000.000 3 50.000.000 4 5.000.000 5 20.000.000 6 15.000.000 7 30.000.000 8 7.825.500.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inspektorat Daerah 2 Inspektorat Daerah 3 Inspektorat Daerah 4 Inspektorat Daerah 5 Inspektorat Daerah 6 Inspektorat Daerah 7 Inspektorat Daerah 8 DPUPR
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	1 2.000.000	Inspektorat Daerah
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 2 Review Dokumen Perencanaan 3 Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa serta DAK 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tersedianya laporan akuntansi sesuai SAP 2 Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah 3 Terwujudnya 12 Laporan bulanan dan 2 laporan semesteran 4 Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai 6 Jumlah Objek Pemeriksaan 7 Terminimalisasinya ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan 8 Jumlah reviu pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dana desa dan DAK 	<ol style="list-style-type: none"> 1 2.000.000 2 2.000.000 3 2.000.000 4 2.000.000 5 5.000.000 6 570.000.000 7 60.000.000 8 70.000.000 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inspektorat Daerah 2 Inspektorat Daerah 3 Inspektorat Daerah 4 Inspektorat Daerah 5 Inspektorat Daerah 6 Inspektorat Daerah 7 Inspektorat Daerah 8 Inspektorat Daerah

4	Review Laporan Keuangan Daerah	4	Jumlah reviu laporan keuangan daerah 2020 dan 10 Laporan Keuangan OPD	4	35.000.000	Inspektorat Daerah
5	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	5	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah reviu LK/JIP Jumlah reviu LPPD	5	75.000.000	Inspektorat Daerah
6	Inventarisasi temuan pengawasan	6	Jumlah laporan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan	6	7.000.000	Inspektorat Daerah
7	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	7	Prosentase tindak lanjut rekomendasi temuan APIP, Inspektorat Provinsi dan BPK	7	90.000.000	Inspektorat Daerah
8	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	8	Terlaksananya rapat koordinasi dan komparasi pengawasan daerah	8	200.000.000	Inspektorat Daerah
9	Pelaksanaan LARWASDA	9	Terlaksananya gelar pengawasan daerah	9	50.000.000	Inspektorat Daerah
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	10	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Jumlah THL	10	65.000.000	Inspektorat Daerah
11	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/tematik	11	Jumlah tindak lanjut atas penugasan pemeriksaan khusus	11	155.000.000	Inspektorat Daerah
12	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	12	Terlaksananya penerapan Reformasi Birokrasi	12	15.000.000	Inspektorat Daerah
13	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	13	Prosentase gratifikasi yang dilaporkan	13	5.000.000	Inspektorat Daerah
14	Koordinasi APIP dan APH	14	Terselenggaranya rapat koordinasi	14	240.000.000	Inspektorat Daerah
15	Peningkatan Kapabilitas APIP	15	Peningkatan level kapabilitas APIP	15	80.000.000	Inspektorat Daerah
16	Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	16	Tersusunnya rencana aksi Kopsugah Tahun 2021 Fasilitasi atas monitoring dari KPK Terealisasinya target rencana aksi Tahun 2021	16	60.000.000	Inspektorat Daerah
17	Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	17	Terwujudnya wilayah zona integritas	17	8.000.000	Inspektorat Daerah
18	Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	18	Jumlah penerapan Whistle Blowing System	18	10.000.000	Inspektorat Daerah
19	LHKPN dan LHKASN	19	Terlaksananya koordinasi pelaporan LHKPN dan LHASN Terlaksananya Money penyampaian LHKPN dan LHASN oleh wajib lapor	19	45.000.000	Inspektorat Daerah

